

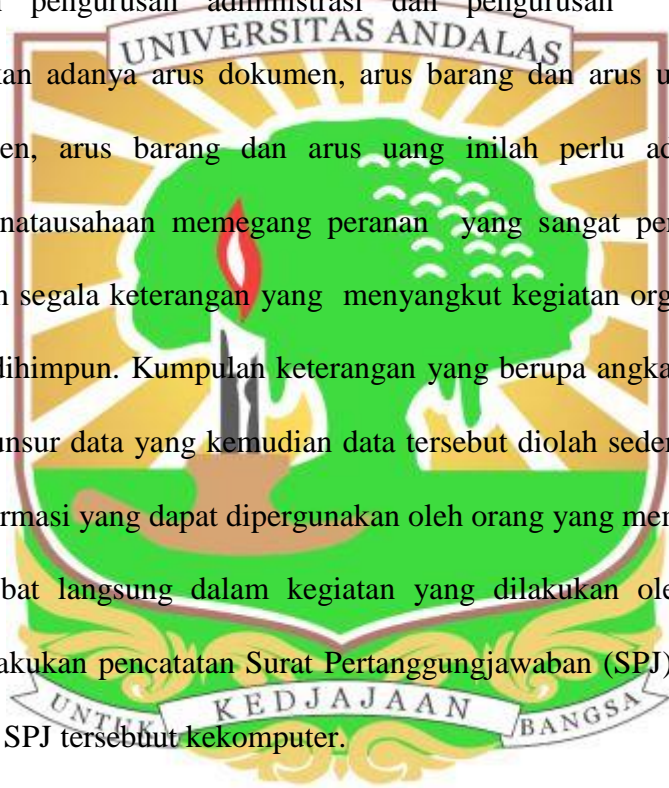
## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dikantor DPRD Kota Padang bertujuan untuk mewujudkan pengurusan administrasi dan pengurusan bendaharawan akan mengakibatkan adanya arus dokumen, arus barang dan arus uang. Dengan adanya arus dokumen, arus barang dan arus uang inilah perlu adanya penatausahaan keuangan. Penatausahaan memegang peranan yang sangat penting karena melalui penatausahaan segala keterangan yang menyangkut kegiatan organisasi secara teratur dicatat dan dihimpun. Kumpulan keterangan yang berupa angka-angka dan kata-kata merupakan unsur data yang kemudian data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh orang yang membutuhkannya.
2. Penulis terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh bagian keuangan. Seperti: melakukan pencatatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kedalam buku besar dan meentry SPJ tersebut kekomputer.
3. Selama melakukan praktek kerja lapangan di DPRD Kota Padang, penulis merasa tercapainya tujuan PKL, karena selama melakukan PKL penulis mengetahui bagaimana penatausahaan bendahara pengeluaran di DPRD Kota Padang dan penulis juga mengetahui bagaimana masalah-masalah yang terjadi pada Penatausahaan Bendahara Pengeluaran di DPRD Kota Padang
4. Berdasarkan hambatan penulis yaitu, sumber daya manusia yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dan terbatasnya anggaran.



## 1.2 Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan memberikan saran untuk perbaikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi Bendahara Pengeluaran di DPRD Kota Padang. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Lebih memfokuskan pada perkembangan anggaran pengeluaran, sebaiknya anggaran di analisis secara detail jumlah serta kegiatan yang akan diselenggarakan agar anggaran pengeluaran kas yang tersusun dan disahkan nantinya bisa menjadi anggaran yang relevan serta efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.
2. Meminimalisasikan pengeluaran kas yang melebihi anggaran, sebaiknya bisa dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur batas maksimum dan minimum pengeluaran yang melebihi anggaran kas secara jelas. Pengeluaran harus melalui proses selektif tetapi tidak rumit dalam pelaksanaannya.
3. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran secara sistematis, jelas dan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Khususnya dalam pengawasan pemeriksaan sebaiknya dilakukan secara mendadak agar para pelaksana fungsi terkait dapat lebih disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
4. Agar pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya, seharusnya DPRD Kota Padang memberikan sarana dan prasarana yang baik, seperti:
  - masing-masing staf diberikan 1 buah komputer, agar pekerjaan tidak ditunda

- ruangan dibagian keuangan sebaiknya lebih diperbesar agar memudahkan dalam bekerja,karena terlalu sempit
- tambahan lemari untuk meletakkan gubi-gubi yang telah dientry kedalam komputer,agar tidak berserakan didalam ruangan yang membuat ruangan tambah sempit
- Ac ruangan seharusnya diperbaiki,agar disiang hari semua staff tetap berada di dalam walaupun cuaca panas dan tidak menunda-nunda pekerjaan.

